

**PERAN DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN DALAM MENUMBUHKAN MODAL SOSIAL
(Studi pada Fasilitasi Kegiatan Kemitraan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)**

Dian Yuliansyah, Hermawan, Romula Adiono

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: diand99@gmail.com

Abstract: *The Role of the Department of Industry and Trade Cooperation of Pasuruan In Cultivating Social Capital (Study On Partnership Facilitation for Micro, Small and Medium Enterprises). Partnership is a relationship between SMEs (and cooperation that put each other on the same level or equivalent and need each other to the principle of mutual benefit. Social capital in this case is seen to have the same concept with the partnership. Thus it will be explained further how Diskoperindag's role in fostering social capital for SMEs partnership facilitation activities in Pasuruan. In this study the role of Diskoperindag explored by the shapes of relationship and social capital indicators were adapted from literature related to social capital. This study is organized into two research focus. First, the role of Diskoperindag described into four social capital indicators, namely: trust, rules, participation and reciprocity networks. Secondly, to describe the conditions in more detail in the context of social capital for SMEs partnership Pasuruan used indicators that focus on relational properties, which relates to the frequency of relationship, the intensity of the relationship and spatial proximity.*

Keyword: *social capital, Diskoperindag, SMEs, and partnership.*

Abstrak: **Peran Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan Dalam Menumbuhkan Modal Sosial (Studi Pada Fasilitasi Kegiatan Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah).** Kemitraan antar UMKM merupakan hubungan (*relationship*) dan kerja sama (*cooperation*) yang menempatkan satu dengan yang lainnya dalam posisi sejajar atau setara serta saling membutuhkan dengan prinsip saling menguntungkan. Modal sosial dalam hal ini dipandang memiliki konsep yang sama dengan kemitraan. Maka dari itu lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana peran Diskoperindag dalam menumbuhkan modal sosial bagi fasilitasi kegiatan kemitraan UMKM Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini peran Diskoperindag ditelusuri dari bentuk relasi serta indikator modal sosial yang diadaptasi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan modal sosial. Penelitian ini disusun kedalam dua fokus penelitian. Pertama, peran Diskoperindag dijelaskan kedalam empat indikator modal sosial yaitu: *trust*, aturan, partisipasi jaringan dan resiprositas. Kedua, untuk lebih rinci menggambarkan kondisi modal sosial dalam konteks kemitraan bagi UMKM Kota Pasuruan digunakan indikator yang lebih fokus terhadap *relational properties*, yaitu berkaitan dengan frekwensi hubungan, intensitas hubungan serta jarak geografis hubungan.

Kata kunci: modal sosial, Diskoperindag, UMKM, dan kemitraan.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pasuruan merupakan pelaku ekonomi yang paling dominan, namun jumlahnya tidak berbanding lurus dengan produktifitas yang dicapai per satuan unit UMKM. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktifitas UMKM antara lain disebabkan kelemahan akses mereka terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pasar, teknologi, bahan baku, dan

tempat usaha. Maka dari itu agar UMKM mampu bersaing dan bertahan di *market* perlu dibentuk jaringan kerja sama antara sesama pelaku usaha. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha adalah dengan mewujudkan kemitraan.

Whittaker (2003, h.1) juga menjelaskan pentingnya kerja sama antara pelaku usaha "*the significance of fostering mental friction where people are in close and frequent*

contact. They realize that, by working together, businesses can overcome some of the problems posed by globalization”, dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa dengan kerja sama, pelaku usaha bisa mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat globalisasi. Modal sosial tidak hanya tumbuh dalam organisasi sosial, lembaga non-pemerintah, komunitas *civil society* yang memiliki nilai-nilai kolektif serta inisiatif lokal saja. Modal sosial dapat ditumbuhkan secara formal (Syahyuti, 2008, h.41) Oleh karena itu dapat dikatakan Modal sosial juga bisa tumbuh dan berkembang dengan adanya *political will* atau campur tangan pemerintah. Pemerintah dapat menumbuhkan modal sosial pada komunitas tertentu atau bahkan sebaliknya. Pemerintah dalam hal ini Diskoperindag akan dilihat perannya dalam menumbuhkan Modal sosial bagi kemitraan antar UMKM di Kota Pasuruan.

Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Diskoperindag dalam menumbuhkan modal sosial bagi fasilitasi kegiatan kemitraan UMKM di Kota Pasuruan.

Tinjauan Pustaka

Menurut World Bank (dalam Syahyuti, 2008, h.33) modal sosial atau *social capital* adalah *”a society includes the institutions, the relationships, the attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development”* dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa modal sosial adalah kelompok masyarakat termasuk institusi, hubungan, nilai dan sikap yang mengatur interaksi antara manusia. Konsep modal sosial sendiri berangkat dari pemikiran tersebut, modal sosial dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya relasi atau hubungan antara individu atau kelompok manusia.

Menurut Tonkiss (dalam Syahyuti, 2008, h.33) modal sosial dianggap memberikan nilai ekonomis apabila membantu individu atau kelompok untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, serta meminimalkan biaya transaksi. Field memaparkan hal

serupa berkaitan dengan peran *trust* atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan dalam relasi atau jaringan sosial *”trust plays a vital role in gaining access to some benefits of social network”*. Akses terhadap keuntungan dari jaringan sosial yang dimaksud oleh Field adalah akses terhadap *knowledge* yang merupakan asset yang berharga (Field, 2008, h.71).

Modal sosial tidak seperti modal fisik lainnya misalnya modal finansial yang dapat diukur dan dihitung secara kuantitatif. Pengukuran modal sosial dijelaskan oleh Grootaert dan Bastelaer (2001, h.9) *”The measurement challenge is to identify a contextually relevant indicator of social capital and to establish an empirical correlation with relevant benefit indicators”*. Grootaert dan Bastelaer menjelaskan bahwa mengukur modal sosial adalah bagaimana mengidentifikasi indikator kontekstual yang relevan dengan modal sosial dan menentukan korelasi empiris terhadap keuntungan.

Selain itu terdapat cara lain dalam mengukur modal sosial, Franke (2005, h.16) menyebutnya *”measuring social capital through network structure”* yaitu mengukur modal sosial dengan struktur jaringan. Salah satunya adalah dengan *Relational Properties* lebih lanjut Franke menjelaskan *”indicator of network structure pertains to relational properties among the members of a network, which can also document the value of social capital”*. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa relasi antara anggota dalam jaringan dapat menjelaskan nilai dari modal sosial. Dengan demikian, indikator yang direkomendasikan adalah: 1) *Relational frequency*, dari indikator ini akan dilihat bagaimana frekuensi hubungan antara aktor atau kelompok. Yaitu berkaitan dengan jumlah kontak yang dilakukan oleh individu atau kelompok. 2) *Relational intensity*, dari indikator ini, akan dilihat bagaimana intensitas hubungan antara aktor atau kelompok. 3) *Spatial proximity of members*, dari indikator ini, akan dilihat bagaimana jarak secara geografis dalam hubungan antara aktor atau kelompok

Definisi kemitraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

Menengah adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM adalah: 1) Adanya Kerja Sama berkelanjutan dengan pelaku UMKM daerah lain, 2) Adanya Keuntungan yang timbal balik antara sesama pelaku UMKM daerah lain. Berdasarkan tujuan dan sasaran kegiatan, UMKM Kota Pasuruan diberikan kesempatan untuk melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk mengembangkan usahanya. Fasilitasi kemitraan ini diberikan karena UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam akses pemasaran serta wawasan potensi pasar yang masih sempit.

Dalam UU No 20 Tahun 2008, definisi usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Sedangkan kriteria Usaha Mikro menurut UU No 20 Tahun 2008 adalah memiliki kekayaan bersih 50.000.000,-(tidak termasuk tanah dan bangunan empat usaha), serta memiliki penjualan paling banyak 300.000.000.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008, h.23), penelitian kualitatif bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Analisis model Spradley prinsipnya adalah melakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data. Basrowi (2008, h.211) menjelaskan teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompensial dan analisis tema. Sedangkan keseluruhan proses termasuk pengamatan terdiri atas: pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen, dan diakhiri dengan analisis tema.

Pembahasan

a. Peran Diskoperindag dalam menumbuhkan Modal Sosial Bagi Fasilitasi Kegiatan Kemitraan UMKM Kota Pasuruan.

Kegiatan kemitraan merupakan salah satu sasaran dari program pemberdayaan UKM yang difasilitasi oleh Diskoperindag dan merupakan bentuk kerja sama antar pelaku usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan adanya kegiatan Kemitraan, UKM diharapkan memiliki peluang untuk memperoleh informasi ataupun sumberdaya yang dapat membantu mengembangkan usaha yang digeluti.

Pada umumnya relasi atau hubungan antara manusia akan selalu melibatkan modal sosial, dalam hal ini kegiatan Kemitraan merupakan salah satu bentuk relasi antara pelaku usaha. Modal sosial merupakan muatan solidaritas semua pihak yang merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam sebuah relasi atau hubungan, lebih khususnya adalah pengelolaan kemitraan. Konsep modal sosial sendiri berangkat dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi tanpa bantuan dari orang lain. Karena itu diperlukan kebersamaan dan kerja sama

antara individu maupun antar kelompok manusia.

Maka dari itu untuk mengetahui apakah Diskoperindag mampu menumbuhkan modal sosial dalam fasilitasi Kegiatan Kemitraan, akan diidentifikasi indikator kontekstual yang relevan dengan modal sosial, yaitu: *Trust* (kepercayaan), norma atau peraturan, partisipasi dalam jaringan, dan resiprositas. Indikator-indikator tersebut akan diterapkan dalam konteks kegiatan kemitraan yang difasilitasi oleh Diskoperindag Kota Pasuruan. Maka dari itu, peran Diskoperindag akan ditelusuri setelah mengidentifikasi indikator-indikator di atas.

1) *Trust* (Kepercayaan)

Trust atau kepercayaan sebagai salah satu elemen dari modal sosial tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme-mekanisme tertentu seperti pembentukan jaringan kerja sama atau misalnya lebih khusus lagi dengan bentuk kerja sama Kemitraan usaha. Dalam konteks hubungan kemitraan, kepercayaan bisa menjadi faktor pendukung agar memudahkan pelaku usaha yang bermitra dalam melakukan alih informasi ataupun sumberdaya tertentu. Karena dalam hubungan kemitraan yang baik semua pihak harus mau membuka informasi maupun sumberdaya yang dimiliki kepada mitra usahanya.

Lendra dan Andi (2006, h.56) mengatakan bahwa kepercayaan merupakan asas dalam kesepakatan dalam kemitraan. Pada penyajian data dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan pada Fasilitasi Kegiatan Kemitraan berada pada tingkatan sedang hingga tinggi yaitu 35% pada tingkatan sedang dan 55% pada tingkatan tinggi dan pada tingkatan rendah hanya 10%. Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi Kegiatan Kemitraan mendapatkan apresiasi yang positif dari pesertanya. Menurut Swen (dalam Lendra dan Andi, 2006, h.60) reputasi individu atau dalam hal ini pelaku usaha yang menjadi mitra merupakan faktor yang penting terhadap kepercayaan. Jika melihat kegiatan Kemitraan yang difasilitasi oleh Diskoperindag, dimana pelaku usaha yang dituju sebagai mitra memiliki keunggulan-keunggulan tertentu pada

produknya. Sehingga wajar jika pelaku UMKM Kota Pasuruan menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

2) *Norms (Rules)*

Peraturan merupakan salah satu elemen penting dalam modal sosial, Coleman menjelaskan "*social capital requires investment in the designing of the structure of obligations and expectations, responsibility and authority, and norms (or rules) and sanctions which will bring about an effectively functioning organization*" (1990, h.313). Dari penjelasan tersebut, Coleman menyebutkan bahwa norma atau peraturan dalam modal sosial merupakan salah satu elemen penting yang membantu efektivitas dalam organisasi. Selain itu Peraturan yang jelas dan adil dapat memperkuat modal sosial, Grootaert dan Bastelaer menjelaskan "*the largest increments in social capital occur where beliefs in participation are reinforced by the existence of rules that are clear and fairly implemented*" (2001, h.11). Dalam konteks hubungan kemitraan, peraturan merupakan landasan bagi para peserta kegiatan kemitraan dalam mengambil tindakan, selain itu dengan adanya peraturan yang jelas diharapkan tidak ada satu pihak yang mendominasi pihak lain. Untuk menghindari hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa para pihak yang bermitra memiliki kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Didalam *Standard Operating Procedures* (SOP) Fasilitasi Kegiatan Kemitraan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UKM menjadi dasar hukum kegiatan.

Pola Kemitraan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Pola tersebut dapat berupa: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan serta bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan, dan *outsourcing*. Dari Pola Kemitraan yang telah disebutkan sebagian besar merupakan pola kemitraan antar UMKM dengan Usaha Besar. Di samping itu disebutkan bahwa Pemerintah daerah mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah. Namun tidak dijelaskan lebih terperinci mengenai pola Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari itu untuk menciptakan hubungan kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antar UMKM diperlukan pola kemitraan yang jelas. Karena telah dijelaskan sebelumnya oleh Grootaert dan Bastelaer bahwa “...*the existence of rules that are clear and fairly implemented*” dimana peraturan yang jelas dan adil bisa menjadi nilai tambah terhadap modal sosial.

3) Partisipasi Jaringan

Partisipasi jaringan merupakan salah satu elemen penting dalam modal sosial. Mawardi (2007, h.7) menjelaskan Moal Sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Dalam konteks jaringan hubungan kerja sama kemitraan yang difasilitasi oleh Diskoperindag Kota Pasuruan, pihak yang ikut terlibat yaitu pelaku UMKM dan Dinas terkait yaitu Diskoperindag.

Jaringan dalam hal ini memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, serta memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama. Dalam jaringan hubungan kerja sama kemitraan yang difasilitasi oleh Diskoperindag Kota Pasuruan, terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku UMKM Kota Pasuruan dengan pelaku UMKM dari Kota lain serta Diskoperindag Kota Pasuruan dengan Dinas terkait dari Kota mitra yang dituju. Pelaku UMKM yang ikut dalam fasilitasi Kegiatan Kemitraan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan Fasilitasi Kegiatan Kemitraan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yaitu:

- 1) Produk yang dihasilkan adalah benar-benar buatan sendiri,
- 2) Sudah memiliki ijin usaha,
- 3) Produk yang dihasilkan berkualitas.

Kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi oleh pelaku UMKM Kota Pasuruan jika ingin mendapatkan Fasilitasi Kegiatan Kemitraan. Karena dengan dipilihnya peserta Kegiatan Kemitraan berdasarkan kriteria tertentu diharapkan agar nantinya

tercipta hubungan timbal balik dengan mitranya, serta kedua belah pihak yang melakukan hubungan kemitraan tidak saling mendominasi atau merasa dirugikan dalam relasi tersebut.

Selain itu, pihak lain yang ikut terlibat dalam kegiatan kemitraan adalah Dinas terkait yaitu Diskoperindag Kota Pasuruan. Dimana peran Diskoperindag adalah sebagai Fasilitator atau jika dianalogikan adalah sebagai jembatan penghubung antara pelaku UMKM Kota Pasuruan dengan pelaku UMKM lain dalam menjalin hubungan Kemitraan. Dalam Perwali Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Diskoperindag tepatnya pada pasal 14 poin J, juga dijelaskan bahwa seksi pemberdayaan UMKM memiliki tugas “menyiapkan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya penyediaan sumber dana dan syarat pemenuhan dana serta kemitraan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah”.

4) Resiprositas

Dalam sebuah relasi atau hubungan yang melibatkan modal sosial, biasanya cenderung diwarnai dengan tindakan saling tukar kebaikan. Dalam konteks hubungan kemitraan, *Recipricity* ditandai dengan adanya saling tukar informasi atau sumberdaya tertentu untuk membantu pelaku usaha yang bermitra dalam mengembangkan usahanya.

Dalam konteks modal sosial, Mawardi (2007, h.7) menjelaskan bahwa pola pertukaran yang dimaksud tidak dilakukan dengan resiprokal seketika seperti halnya dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang. Jika dilihat dalam konteks kegiatan Kemitraan antar UMKM yang difasilitasi oleh Diskoperindag, dimana pelaku UMKM Kota Pasuruan yang ikut dalam kegiatan kemitraan melakukan alih teknologi atau teknik produksi, serta perluasan akses pemasaran dengan mitranya dapat dikatakan adalah hubungan kemitraan dalam jangka pendek. Dimana pola pertukaran yang dimaksud terjadi pada saat kegiatan berjalan.

b. Kondisi Modal Sosial Dalam Fasilitasi Kegiatan Kemitraan

Untuk melihat bagaimana kondisi modal sosial dalam fasilitasi Kegiatan Kemitraan, peneliti akan mengidentifikasi dan mengukur Modal Sosial tersebut terlebih dahulu. Modal sosial tidak seperti bentuk modal fisik atau modal finansial yang dapat dihitung dan dinyatakan dengan jelas secara kuantitatif. Maka dari itu, peneliti menggunakan beberapa indikator yang diadaptasi dari Franke (2005, h.16) yaitu berhubungan dengan *Relational Properties*. Franke mengatakan *Network structure pertains to relational properties among the members of a network, which can also document the value of social capital* (2005, h.16). Dari penjelasan tersebut dikatakan bahwa kekayaan dalam sebuah relasi atau hubungan dapat menunjukkan nilai dari Modal Sosial, dan indikator yang direkomendasikan dari *relational properties* adalah *Relational Frequency*, *Relational intensity*, dan *Spatial proximity*. Dalam konteks Fasilitasi Kegiatan Kemitraan, pemaparan dari ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1) Frekwensi Hubungan (*Relational Frequency*)

Franke (2005) menjelaskan bahwa frekwensi atau jumlah kontak dalam sebuah relasi, baik itu relasi atau hubungan antar individu maupun kelompok dapat menunjukkan kemampuan dalam bersosialisasi. Di mana hal tersebut akan mengarah kepada akses terhadap modal sosial. Oleh karena itu dapat dikatakan semakin sering individu atau kelompok melakukan kontak maka semakin besar nilai atau kemungkinan akses terhadap modal sosial.

Frekwensi hubungan dapat dilihat dari jumlah kontak individu ataupun kelompok. Franke (2005, h.16) menjelaskan "*Relational frequency and the number of contacts of individuals help to pinpoint their level of "sociability" and, therefore, their access to social capital. The same reasoning applies to groups*". Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa frekwensi atau jumlah kontak dalam sebuah relasi individu atau kelompok dapat menunjukkan kemam-

puan dalam bersosialisasi yang mengarah pada akses terhadap modal sosial.

Jika melihat frekwensi hubungan kemitraan Pelaku UMKM Kota Pasuruan dengan mitranya, dalam setahun setelah kegiatan dilaksanakan dapat dikatakan rendah. Karena pelaku UMKM yang bermitra melakukan kontak atau transaksi hanya pada saat kegiatan tersebut berjalan yaitu 1 Tahun sekali. Jadi dapat dikatakan frekwensi hubungan dalam fasilitasi kegiatan kemitraan yaitu cenderung rendah. Karena kontak hanya dilakukan pada saat kegiatan berjalan, setelah itu tidak ada kontak yang signifikan antara Pelaku UMKM Kota Pasuruan dengan mitranya. Untuk Lebih jelasnya, berdasarkan kuesioner yang disebarikan yaitu dengan jumlah 20 kuesioner yang valid menunjukkan bahwa hanya 1 dari 20 responden yang melakukan kontak dengan mitra yang sama setelah Kegiatan Kemitraan berjalan.

2) Intensitas Hubungan (*Relational intensity*)

Intensitas hubungan dapat dilihat bagaimana anggota yang terlibat dalam jaringan kerja sama saling bertukar sumberdaya atau informasi tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Franke (2005, h.16) *The stronger the ties among the members of a network, the greater the chance that they will be disposed to exchanging resources*. Pada pemaparan data berkaitan dengan Resiprositas telah dijelaskan bahwa dalam konteks hubungan kemitraan sumber daya atau informasi yang dialihkan dapat berupa bahan baku, teknik pengemasan produk, serta akses pemasaran. Pada indikator ini akan lebih dijelaskan bagaimana kondisi pada saat Kegiatan Kemitraan berjalan, serta apa saja yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam Fasilitasi Kegiatan Kemitraan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peserta kemitraan mengikuti kegiatan selama tiga hari. Untuk pelaksanaan kegiatan dimulai pada hari kedua dan ketiga serta berlokasi di Dinas terkait yang dituju. Jika hubungan kemitraan dalam pemasaran produk, peserta kegiatan akan menyetujui nota kesepakatan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan

yang ada didalamnya. Seperti produk apa yang akan dipasarkan serta ketentuan pembayaran. Jika hubungan kemitraan dalam hal alih keterampilan atau teknik produksi, para peserta akan mendengarkan presentasi dari nara sumber.

Jika dibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dapat dikatakan bahwa hubungan kemitraan antar UMKM bukanlah suatu bentuk hubungan dengan ikatan emosional, dimana untuk melakukan alih informasi atau sumberdaya tertentu pada Kegiatan Kemitraan antar UMKM tidak dibutuhkan ikatan emosional seperti yang dimaksudkan.

3) Jarak Geografis Hubungan (*Spatial proximity*)

Dalam hal ini *Spatial proximity* atau Jarak Geografis Hubungan akan dilihat apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Hubungan Kemitraan antar UMKM. Wellman dalam Franke (2005, h.16) menambahkan perspektif geografis dengan mengungkapkan bagaimana pengaruh *Spatial proximity* terhadap Modal Sosial dalam sebuah struktur jaringan kerja sama. Jika dilihat dalam konteks hubungan kemitraan antar UMKM yang difasilitasi oleh Diskoperindag Kota Pasuruan, jarak geografis bisa menjadi faktor yang ikut berpengaruh.

Berdasarkan Rencana, Kegiatan Program Diskoperindag Kota Pasuruan, Fasilitasi Kegiatan Kemitraan dilaksanakan diluar Provinsi. Jika dilihat dari lokasi kegiatan kemitraan yang telah diadakan sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011, Kota yang dituju adalah sebagai berikut: 1) Tahun 2006 di Kota Balikpapan, 2) Tahun 2007 di Kota Batam, 3) Tahun 2009 di Kota Bandung, 4) Tahun 2010 di Kota Jogjakarta, 5) Tahun 2011 di Kabupaten Bandung.

Dari pemetaan lokasi Kegiatan Kemitraan diatas dapat dilihat bahwa seluruh Kegiatan diadakan diluar Kota Pasuruan dan berdasarkan Rencana, Kegiatan Program Diskoperindag Kota Pasuruan tentang Fasilitasi Kegiatan Kemitraan lokasi kegiatan berada diluar Provinsi. Hal tersebut bertujuan agar pelaku UMKM Kota Pasuruan dapat mengembangkan jaringan

pemasarannya, serta dapat belajar dari pelaku UMKM dari Kota lain mengenai teknologi atau teknik produksi.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa relasi atau hubungan kemitraan dalam alih teknologi serta teknik produksi mendapatkan respon positif dari Pelaku UMKM Kota Pasuruan. Karena jika dilihat dari lokasi Kegiatan Kemitraan yang dituju adalah Kota yang memiliki keunggulan tertentu pada produk usahanya. Sedangkan dalam hubungan kemitraan pemasaran produk, Pelaku UMKM Kota Pasuruan dapat memperluas pangsa pasarnya. Namun untuk relasi jangka panjang dengan distributor atau *buyer*, mereka cenderung lebih memilih distributor atau *buyer* lokal. Karena dengan alasan lebih mudah dipantau serta segmentasi pasar yang lebih jelas.

Kesimpulan

Secara teoritis modal sosial dikatakan dapat tumbuh dengan adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah atau bahkan sebaliknya. Dalam hal ini Diskoperindag berperan sebagai fasilitator yang menjembatani hubungan atau relasi kemitraan antara UMKM Kota Pasuruan dengan UMKM mitra yang dituju. Jika dilihat dalam konteks kegiatan kemitraan UMKM yang difasilitasi oleh Diskoperindag. Secara keseluruhan Diskoperindag Kota Pasuruan telah memenuhi elemen-elemen modal sosial yang telah ditelusuri seperti *trust*, peraturan, partisipasi dalam jaringan, dan resiprositas. Namun setelah ditelusuri lebih jauh mengenai kondisi modal sosial dengan indikator yang lebih fokus menjelaskan *relational properties*, hasil penelitian menunjukkan modal sosial bagi kemitraan UMKM dapat dikatakan rendah, karena setelah ditelusuri, ditemukan bahwa Kemitraan antar UMKM dalam hal ini adalah hubungan Kemitraan dalam jangka pendek. Sedangkan Modal Sosial akan tumbuh jika dalam hubungan yang *sustainable* (berkelanjutan).

Temuan lainnya adalah diketahui bahwa kegiatan Kemitraan secara umum memiliki berbagai macam pola yaitu: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan. Namun pola Kemitraan yang disebutkan diatas merupakan Pola Kemitraan antara Usaha Besar

dengan UKM. Sedangkan Pola Kemitraan antar UMKM dengan UMKM walaupun sudah ada namun belum terpola dengan baik, serta masih bersifat temporer.

Maka dari itu Pola Kemitraan bagi UMKM perlu disesuaikan dengan potensi, kondisi, serta bidang usaha yang digeluti oleh UMKM yang bermitra. Dimana hubungan kemitraan berdasarkan atas kesamaan tujuan sehingga tercipta hubungan timbal balik, saling membutuhkan dan berkelanjutan diantara UMKM yang bermitra. Dengan begitu Pemerintah dapat memberikan kontribusi dengan peraturan-peraturan

yang kondusif dan berpihak pada pemberdayaan UMKM.

Selain itu dengan membentuk lembaga atau asosiasi kemitraan yang sehat dengan bidang atau jenis usaha tertentu, baik itu dalam bentuk formal maupun informal. Dimana Lembaga atau asosiasi tersebut beranggotakan pelaku usaha yang bergerak pada bidang yang sama. Karena Modal Sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, Suwandi. (2008) **Memahami Penelitian Kualitatif**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Coleman, J.S. (1990) **Foundations of Social Theory**. Cambridge, MA, Belknap/Harvard University Press.
- Claridge, Tristan. (2004) **Social Capital and Natural Resource Management: An important role for social capital?** School of Natural and Rural Systems Management, University of Queensland
- Field, John. (2008) **Social Capital**. New York, Routledge Publisher.
- Franke, Sandra. (2005) **Measurement of Social Capital**. Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation.
- Grootaert, Bastelaer. (2001) **Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendations from the Social Capital Initiative**. *Social Capital Initiative Working Paper* No. 24.
- Mawardi, M.J. (2007) **Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat**. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol 3, Nomor 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan** [Internet] Available from: <http://perundangan.deptan.go.id/admin/p_pemerintah/PP-44-97.pdf> [Accessed: 09 April 2013]
- Syahyuti (2008) **Peran Modal Sosial (Social Capital) Dalam Perdagangan Hasil Pertanian**. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol.26 No.1: 32-43.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah** [Internet] Available from: <<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/17681/UU20Tahun2008UMKM.pdf>> [Accessed 09 April 2013]
- Whittaker, et al. (2003) **Understanding and measuring the effect of social capital on knowledge transfer within clusters of small-medium enterprises**. *A paper for the Small Enterprise Association of Australia and New Zealand* 16.